

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perkembangan IPTEK yang pesat memaksa kita untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini dimana berbagai aktivitas manusia tidak pernah terlepas dari penggunaan alat bantu teknologi. Oleh karena itu, pendidikan merupakan jawaban yang tepat dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang ini, dimana merupakan upaya membentuk manusia yang berkualitas, berprikemanusiaan, untuk menjadi manusia seutuhnya.

Pemerintah terus mengadakan upaya-upaya penyelenggaraan pendidikan bermutu yang dapat menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang unggul dan berdaya saing. Namun dalam kenyataannya, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu saja bukanlah jalan keluar yang relevan dengan kondisi kehidupan bangsa kita ini.

Banyaknya masyarakat pada usia sekolah yang lebih memilih untuk tidak bersekolah, merupakan salah satu bukti bahwa upaya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu masih banyak yang kurang merasakannya, karena alasan ekonomi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mendapatkan pendidikan itu, perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Seperti kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu. Hal ini disebabkan antara lain, karena mahalny biaya pendidikan, seperti yang dipaparkan pada alenia sebelumnya bahwa pendidikan yang bermutu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang memang tidak mampu dengan biaya pendidikan yang tidak sedikit itu.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM beberapa tahun belakangan dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah, dengan alasan karena semakin meningkatnya harga minyak dunia. Pada bulan Maret dan Oktober 2005 pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM secara drastis. Hal ini berdampak pada sektor kesehatan, yang ditandai dengan semakin rendahnya daya tawar masyarakat untuk melakukan pengobatan atas penyakit yang dideritanya, serta berdampak pada sektor pendidikan yang ditandai antara lain, dengan banyaknya siswa putus sekolah, karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, serta ketidakmampuan siswa membeli alat tulis dan buku pelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Guna memperkecil dampak kenaikan harga BBM di sektor pendidikan, masyarakat

yang langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM, berupa melambungnya berbagai kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat (4) program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan bantuan langsung tunai (BLT).

Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah. Dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-undang dan upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak sekaligus kewajiban yang harus diikuti setiap warga negara, dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan tersebut, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” (Sisdiknas, 2003)

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dikutip dari buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Ditjen manajemen pendidikan dasar dan menengah, (Depdiknas 2009), menyebutkan bahwa “Bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi penting untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu, dengan biaya satuan BOS yang telah dinaikkan secara signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar.

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Besarnya dana BOS sebelumnya yang diterima oleh sekolah/madrasah/ponpes dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan berikut ini.

1. SD/MI/SDLB/salafiyah/sekolah agama non islam setara SD sebesar Rp. 254.000 /siswa/tahun.
2. SMP/MTs/SMPLB/salafiyah/sekolah agama non islam setara SMP sebesar Rp. 354.000 /siswa/tahun.

Departemen Pendidikan Nasional menaikkan anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS untuk jenjang SD dan SMP pada 2009 sekitar 50 persen dari tahun sebelumnya. Dengan naiknya BOS, pemerintah meminta tidak boleh ada lagi pungutan kepada siswa, terutama di sekolah negeri.

Dana BOS untuk setiap siswa disatukan dengan BOS Buku dan besarnya berbeda antara di kota dan kabupaten. BOS untuk siswa SD per tahun di kabupaten besarnya Rp 397.000, sedangkan di kota Rp 400.000. Besarnya alokasi BOS sebelumnya Rp 254.000 dan BOS Buku Rp 22.000.

Adapun siswa SMP di kota mendapat dana BOS sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun, sedangkan di kabupaten Rp 570.000 per tahun.

Dalam buku Panduan BOS DITJEN Pendidikan Dasar dan Menengah (2009) menyebutkan bahwa secara umum program BOS ini bertujuan untuk

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Program BOS sebagai alokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan - dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan pendidikan, antara lain berupa pengadaan bahan ajar, pengadaan buku untuk perpustakaan, pembelian ATK, pembelian alat praktikum, pemeliharaan sekolah, dan sebagainya.

Meskipun merupakan Program BOS, kegiatan pengadaan barang/jasa tetap wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan tentang pengadaan barang/jasa dan untuk yang terkait dengan obyek pajak, wajib dipungut pajaknya sesuai dengan peraturan tentang perpajakan.

Menurut Bambang Sudibyo dalam rapat teknis bidang pendidikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dihadiri para bupati dan kepala dinas pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu 5 November 2008 mengatakan bahwa "Dana BOS dan gaji guru sudah dinaikkan pemerintah pusat. Maka, wajib belajar di SD dan SMP negeri gratis. Tidak boleh ada pungutan paksa kepada siswa,".

Dalam buku panduan dana BOS (2009) disebutkan bahwa salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/ sederajat. Pada tahun 2008 APK rata-rata telah mencapai 96,18%, sehingga program Wajib Belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah Indonesia dan bahkan target itu dapat dicapai 7 tahun lebih awal dibandingkan dengan komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakar mengenai Education for All (EFA) tahun 2000 yang mewajibkan semua negara di dunia harus menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun paling lambat tahun 2015 nanti.

Berdasarkan uraian di atas perlu adanya upaya pengamatan dan penelitian mengenai proses penggunaan dana BOS di lapangan dalam upaya mencapai tujuan wajar dikdas. Dengan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses penggunaan dana BOS dan pengaruhnya terhadap angka melanjutkan siswa ke jenjang pendidikan menengah pertama seperti yang telah diwajibkan dalam mencapai tujuan wajar dikdas sembilan tahun yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP) yang merupakan jenjang pendidikan dasar wajib belajar sembilan tahun. Dengan mengetahui mengetahui prosedur penggunaannya

maka dapat diketahui sejauh mana keberhasilan program dana BOS ini dalam upaya mencapai tujuan wajar dikdas sembilan tahun dengan melihat angka melanjutkan siswa dari SD ke SMP.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Lembang terhadap Kepala Sekolah sebagai perencana dan pengatur kegiatan di sekolah, terhadap guru dan staf administrasi, juga terhadap siswa SMP Negeri 1 Lembang khususnya siswa yang masih duduk di kelas VII. Adapun alasan penelitiannya lebih difokuskan terhadap siswa kelas VII karena siswa tersebut adalah siswa yang baru menginjak ke jenjang pendidikan menengah pertama yang merupakan lanjutan dari jenjang Sekolah Dasar sehingga dapat melihat perkembangan peningkatan angka melanjutkannya dengan membandingkan angka melanjutkan ketika belum diselenggarakannya program dana BOS dalam wajar dikdas sembilan tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penggunaan Dana BOS Terhadap Upaya Pencapaian Tujuan Wajar Dikdas Sembilan Tahun (Studi Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri I Lembang)”**.

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bahan minyak, amanat undang-undang dan upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri atau swasta di seluruh Indonesia. Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Oleh karena itu, yang menjadi bahan pokok dalam penelitian ini adalah memperoleh gambaran nyata dari pengaruh penggunaan dan BOS tersebut khususnya di SMP Negeri 1 Lembang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri atau swasta di seluruh Indonesia. Oleh karena itu diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Lembang dalam rangka mensukseskan program wajib belajar sembilan tahun.
- b. Bagaimanakah tanggapan masyarakat/orang tua siswa terhadap program dana BOS dalam upaya mensukseskan wajar dikdas sembilan tahun.

- c. Seberapa besar pengaruh dana BOS terhadap angka melanjutkan siswa dari tingkat SD/ sederajat ke jenjang pendidikan SMP/ sederajat di SMP Negeri 1 Lembang.

C. Tujuan Penelitian

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mencari, serta mendapatkan informasi yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan penulisan skripsi mengenai pengaruh penggunaan dana BOS terhadap upaya pencapaian tujuan wajar dikdas sembilan tahun khususnya di SMP Negeri 1 Lembang.

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, secara lebih spesifik bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Lembang dalam upaya mencapai tujuan program wajib belajar sembilan tahun.
2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan diselenggarakannya dana BOS.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan dana BOS terhadap pencapaian tujuan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

D. Anggapan Dasar dan Hipotesis

1. Anggapan Dasar

Kelangsungan pendidikan anak menurut Partowisastro dalam Maryono (1998: 89-95) dipengaruhi oleh :

1) minat orang tua untuk menyekolahkan anak yang dapat dipengaruhi oleh ekonomi keluarga dan atau persepsi orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak, 2) minat anak untuk bersekolah dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga juga tingkat prestasi anak di sekolah, 3) faktor lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pendidikan anak baik positif maupun negatif.

Sedangkan menurut Slameto (2002: 53), ada 2 faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari jasmaniah, psikologi, kondisi tubuh IQ, minat, perhatian, bakat dan kematangan. Sedangkan faktor ekstern adalah dari faktor keluarga dan faktor sekolah misalnya faktor orang tua dalam mendidik anaknya, suasana rumah, model mengajar, saran prasarana, pembiayaan dan lain-lain.

2. Hipotesis

Berdasarkan anggapan tersebut dapat diasumsikan bahwa pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah diantaranya dapat membantu pembiayaan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya minimal ke jenjang wajar dikdas.

Jika pengelolaan dan penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah dilakukan dengan benar maka diduga dapat menuntaskan pencapaian pendidikan dasar 9 tahun, dengan hipotesis : “Penggunaan dana BOS berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun”.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk bahan melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan lebih akurat dalam memecahkan masalah-masalah lain yang berkaitan.

2. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai dana BOS yang merupakan suatu variabel dalam upaya mensukseskan program wajib belajar sembilan tahun serta melatih kemampuan analisis dan berpikir yang sistematis.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Lembang yang beralamat di Jalan Raya Lembang No 357 Kabupaten Bandung Barat.

2. Waktu

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010.

